

Prosiding

Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)

Call for Papers 2017

**Penguatan Daya Saing Industri Nasional
dalam Kancah Bisnis Global Guna Mendukung
Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia**



**Fakultas Ekonomi
Universitas Widyagama Malang**



| | |
|---|-----------|
| KOMPLEKSITAS PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH: SEBUAH KAJIAN BERPIKIR SISTEM Dina Suryawati | 74 - 80 |
| UANG, BUNGA, DAN KEMISKINAN PERMANEN Nasharuddin Mas | 81 - 89 |
| IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ETIKA AKUNTANSI BERBASIS ETIKA ISLAM Muslichah, Wiryani, dan Evi Maria | 90 - 99 |
| PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA <i>FOODCOURT</i> YANG BERKONSEP KEBUDAYAAN TRADISIONAL Yufenti Oktavia dan Novy Karmelita Indrawati | 100 - 109 |
| PERAN PRAKTIK <i>SUPPLY CHAIN MANAGEMENT</i> DAN ORIENTASI LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN Achmad Syamsudin | 110 - 117 |
| MODEL RANTAI PASOK KAKAO DI SULAWESI TENGAH Muslimin, Nersiwad, dan Mukhtar Tallesang | 118 - 126 |
| MODEL RANTAI PASOK DAN PENYUSUTAN MUTU HASIL PERIKANAN TANGKAPDI KAWASAN TELUK TOMINI SULAWESI TENGAH Sulaeman Miru dan Suparman | 127 - 133 |
| ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DISAIN PRODUK, HARGA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN IM3 PADA MAHASISWA STIE MAHARDHIKA SURABAYA Nuzulul Fatimah | 134 - 141 |
| PENGARUH <i>IN-STORE</i> SEBAGAI MEDIASI <i>HEDONIC MOTIVE</i> TERHADAP <i>IMPULSE BUYING</i> (STUDI PADA TOKO SEPATU DI YOGYAKARTA) Wisnalmawati | 142 - 147 |
| MAKNA NILAI DALAM PEMASARAN RELASIONAL Mochammad Farid Afandi | 148 - 153 |
| PENGARUH KUALITAS MAKANAN, KEWAJARAN HARGA SERTA LINGKUNGAN FISIK TERHADAP KEPUASAN DAN RETENSI PELANGGAN MD Rahadhini dan Lamidi | 154 - 162 |
| SEGMENTASI KONSUMEN PADA PASAR <i>ONLINE</i> DI INDONESIA Lailatul Hijrah | 163 - 170 |

KOMPLEKSITAS PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH: SEBUAH KAJIAN BERPIKIR SISTEM

Dina Suryawati
dinasuryawati@ymail.com

ABSTRAK

Kompleksitas permasalahan keuangan daerah secara konseptual merupakan krisis fiskal bagi pemerintah daerah serta merupakan sumber risiko fiskal bagi daerah. Fenomena kompleksitas masalah ini tidak bisa hanya ditinjau dari satu sisi namun harus ditinjau secara sistemik. Tulisan ini berusaha mengeksplorasi permasalahan keuangan daerah di Indonesia dengan pendekatan berpikir sistem. Adapun tujuan berpikir sistem yakni menemukan pola/patern terhadap persoalan keuangan yang sesungguhnya.

Kata kunci: Kompleksitas, Keuangan daerah, Sistem

PENDAHULUAN

Secara teoritis, desentralisasi fiskal dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan serta mengurangi informasi dan biaya transaksi yang terkait dengan penyediaan layanan publik (De Mello 2000 dalam Elhiraika, 2007). Hasil penelitian Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa secara statistik pelayanan publik mengalami peningkatan setelah adanya desentralisasi, namun beberapa daerah tertinggal di Indonesia Timur (propinsi Papua dan Papua Barat) secara konsisiten berada dalam posisi terendah dalam hal pelayanan publik meskipun memiliki sumberdaya fiskal yang cukup dan alokasi dana perimbangan yang cukup besar diluar dana-dana tambahan terutama dana otonomi khusus. Lebih lanjut temuan Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan dan dana dekon/TP ke daerah tidak memiliki efek yang konsisten terhadap pelayanan publik, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan pelayanan publik secara umum dipengaruhi oleh faktor lain diluar alokasi dana tersebut. Fenomena lain ditunjukkan dari hasil penelitian Yunida dan Zaitul (2008) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak proporsional dengan peningkatan belanja kesehatan, dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap belanja pelayanan kesehatan dengan kata lain, peningkatan kewenangan daerah untuk mengalokasikan anggaran lebih banyak digunakan untuk meningkatkan belanja di bidang yang lainnya. Di sisi lain, desentralisasi fiskal memiliki keterbatasan terhadap pelayanan publik. Menurut Elhiraika (2007) ketika daerah memiliki keterbatasan sumber pendanaan sehingga terjadi bias dan defisit anggaran. Keadaan ini akan mempengaruhi penyediaan layanan publik bagi pemerintah daerah. Di Indonesia, rendahnya kapasitas fiskal daerah diwujudkan dengan rasio ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan (2014) diketahui bahwa rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 8,5%, sedangkan rata-rata rasio dana transfer terhadap pendapatan daerah mencapai 91,2%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Kenyataan lain, pemerintah daerah menghadapi peningkatan terhadap belanja daerahnya, jika demikian yang terjadi maka telah menimbulkan asimetris antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal karena belanja yang terus meningkat tanpa diikuti oleh peran PAD yang signifikan (DJPK, 2014). Berdasarkan data dari DJPK memang terdapat peningkatan jumlah PAD akan tetapi juga terjadi peningkatan jumlah transfer pusat terhadap daerah.

Data dari DJPK (2014) menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan PAD dari sebelum desentralisasi fiskal (sebelum 2001) ke pelaksanaan desentralisasi fiskal (setelah 2001) mengalami peningkatan tiga kali lipat yakni dari 5,5 triliun di tahun 2000 menjadi 15,2 triliun di tahun 2001. Perkembangan yang pesat dapat dilihat dengan membandingkan penerimaan asli daerah ketika menggunakan regulasi UU No 34 tahun 2000 dan UU No 29 tahun 2009, penerimaannya meningkat dari 67,6 triliun (di tahun 2009) menjadi 180,3 triliun di tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh kebijakan penguatan kewenangan perpajakan daerah. Meskipun daerah mengalami peningkatan dalam hal PAD, namun ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan PAD akan tetapi ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat juga mengalami peningkatan. Data terbaru terkait tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Triliun Rupiah)

| Uraian | 2015 | 2016 | 2016* |
|----------------------|------------|------------|---------------|
| Transfer ke Daerah | 602,24 | 723,19 | 729,27 |
| Dana Perimbangan | 582,91 | 700,43 | 687,51 |
| Dana Transfer Umum | 430,94 | 491,49 | 486,83 |
| Dana Transfer Khusus | 151,97 | 208,93 | 200,67 |
| Dana Insentif Daerah | 1,66 | 5 | 5 |
| Dana Otonomi Khusus | 17,66 | 17,76 | 18,81 |
| Dana Desa | 20,76 | 46,98 | 46,98 |
| Total | 623 | 770 | 776,25 |

Sumber: Kementerian Keuangan RI (Laporan INDEF, 2016)

Tabel di atas mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat sangatlah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam peningkatan kapasitas kemandirian dan kapasitas pembangunan sangat rendah, karena ditunjukkan dengan sebagian besar (60%) pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 22,26% (INDEF, 2016).

Kompleksitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Fenomena ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pusat merupakan fenomena umum yang banyak terjadi negara-negara lain seperti halnya yang dirangkum oleh Fjeldstac and Heggstad (2012:3) bahwa beberapa pakar seperti Bird (2010), Boadway dan Shah (2009), Boex dan Martinez Vazquez (2006) menyatakan bahwa pemerintah daerah umumnya tergantung pada transfer dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Keadaan ini akan menjadi persoalan terutama pada pemerintah pusat yang kemudian terkesan “terbebani” dengan kebijakan otonomi itu sendiri. Hal ini tentunya memerlukan kajian tersendiri karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar namun potensi-potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Atau justru terdapat risiko yang tidak terprediksi oleh daerah sehingga mengakibatkan pembengkakan pada sisi pengeluaran maupun pembiayaan yang berujung pada ketergantungan fiskal pada pusat. Jika keadaan ini terus berlanjut maka akan mengakibatkan turunnya kinerja fiskal daerah.

Besarnya dana yang harus di transfer oleh pusat kepada daerah memberikan sinyal bahwa pemerintah mendapatkan tekanan fiskal dikarenakan risiko fiskal yang terjadi di daerah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Polackova (2005):

“Growing experience indicates that the central government and the country’s public finances are at risk when local governments expose themselves to excessive fiscal risk. Local fiscal risk can be defined as a source of financial stress that could face a local government in the future. Similarly to central government, local governments can accumulate direct and contingent liabilities”.

Pengalaman yang berkembang menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan keuangan publik (negara) itu beresiko ketika pemerintah daerah ‘mengekspos’ diri mereka secara berlebihan untuk risiko fiskal. Risiko fiskal yang berlebihan dapat didefinisikan sebagai sumber stres keuangan yang bisa dihadapi pemerintah daerah di masa depan. Terjadinya akumulasi kewajiban langsung dan kontinjensi dari pemerintah daerah sedangkan satu sisi daerah jika tidak mampu untuk mengatasinya maka tentunya hal ini akan membebani pemerintah pusat. Keadaan ini juga sesuai yang dikemukakan Polackova (2005) bahwa salah satu alasan yang menyebabkan resiko fiskal adalah biaya reformasi transisi dan struktural yang kemudian menciptakan skema dan pergeseran pembiayaan untuk masa depan. Biaya Pemilukada nampaknya menjadi beban bagi APBD sebagaimana yang telah diteliti oleh Koeswara *et.al* (2013) bahwa “*pemilukada is budgeted in APBD, heavily encumbering regional finance*”, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung telah menimbulkan beban yang berat bagi anggaran daerah.

Beberapa persoalan yang dikemukakan di atas memberikan sinyal bahwa kemandirian fiskal daerah tidak hanya menyangkut kemampuannya menghimpun pendapatan akan tetapi juga terkait dengan kemampuan untuk mengelola pengeluarannya yang berasal dari penghimpunan sumber-sumber penerimaan yang telah dilakukan. Tekanan fiskal (*fiscal stress*) akan terjadi ketika daerah menerima pendapatan dari sumber penerimaan akan tetapi penerimaan tersebut tidak cukup untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib. Hal ini sesuai dengan pendapat Moore (1985) dan Badu and Li (1994) dalam Honadle, *et al.* (2003) bahwa tekanan fiskal (*fiscal stress*) terjadi ketika pemerintah tidak mampu untuk menyeimbangkan anggaran serta ketidakseimbangan antara peningkatan pendapatan dan kebutuhan pengeluaran. Jika terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, maka daerah akan mencari sumber-penerimaan lain untuk menutup kekurangan atas belanjanya. Dalam konteks pemerintahan daerah, jika sumber-sumber lain ini diperoleh dari dana transfer dari pusat dan bukan PAD maka kemandirian fiskal daerah masih dipertanyakan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan (2014) pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal tidaklah banyak. Sebagian besar posisi pemerintah daerah berada pada kisaran 0,2,persen bahkan dengan membandingkan antara tahun 2002 dan 2010 justru memperlihatkan bahwa semakin banyak pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal rendah. Berdasarkan keadaan ini dapat dikatakan bahwa meskipun umur otonomi daerah semakin beranjak dewasa akan tetapi tidak diimbangi dengan kemandirian dan kedewasaan dalam hal pendapatan. Hal ini terjadi karena terdapat kesenjangan fiskal di daerah yakni terdapat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki oleh daerah. Kesenjangan fiskal atau *fiscal gap* ini disebabkan oleh tiga hal (Kumorotomo, 2008:9) yakni: *pertama* pemerintah daerah memegang kewenangan pembelanjaan yang lebih banyak dibanding dengan kewenangan penerimaan atau dengan kata lain terlalu sedikit sumber-sumber penerimaan yang diberikan otoritasnya kepada pemerintah daerah. *Kedua*, pemerintah daerah harus melakukan belanja atau pengeluaran yang lebih banyak daripada modal pembangunan dan layanan publik yang tersedia, dan *ketiga* pemerintah lokal belum mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan penerimaan. Hal yang kemudian terjadi adalah meski kurang mandiri dalam hal pendapatan akan tetapi daerah mengalami peningkatan jumlah belanja.

Berbagai persoalan di atas merupakan tekanan-tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang berpotensi terjadinya risiko fiskal di daerah. Risiko fiskal adalah tekanan fiskal yang kemungkinan besar terjadi pada masa yang akan datang dikarenakan: 1) tujuan pemerintah

tidak tercapai akibat penurunan kesehatan fiskal, 2) perubahan APBD, 3) potensi defisit APBD akibat faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan tambahan belanja diluar anggaran atau kurangnya realisasi pendapatan (Hoesada, 2015) dikutip dari: <http://www.ksap.org/sap/risiko-fiskal-pemerintah-pusat-dan-daerah/> yang diakses pada 18 November 2015. Kesehatan fiskal bagi pemerintah daerah memegang peranan penting karena merupakan indikasi kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan pemberian layanan kepada masyarakat (Huang Ju, 2013). Kesehatan fiskal pemerintah daerah juga memegang peranan penting untuk stabilitas dan efisiensi keuangan seluruh negara itu, namun pemerintah pusat sering memiliki informasi yang terbatas terkait keuangan publik lokal yang kemudian dijadikan dasar untuk menilai risiko fiskal lokal dan perencanaan fiskal dalam keadaan darurat fiskal (Jun Ma, 2001). Ramadyanto (2013) menyatakan bahwa untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menerima guncangan risiko dapat dilihat dari kesehatan APBDnya, semakin sehat APBD maka semakin mampu menghadapi risiko.

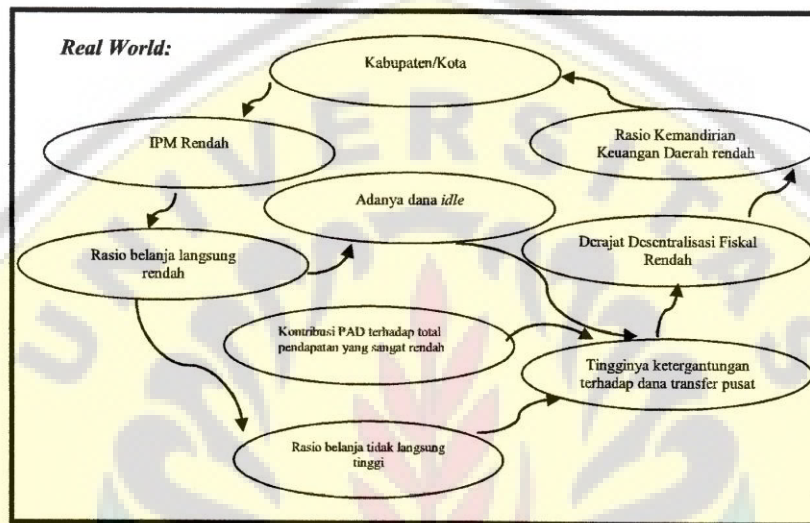
Kompleksitas permasalahan terkait dengan keuangan daerah secara konseptual merupakan krisis fiskal bagi pemerintah daerah serta merupakan sumber risiko fiskal bagi daerah. Jika daerah mengalami tekanan maupun kesulitan fiskal akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Jun Ma (2001) berpendapat bahwa Keadaan kesulitan fiskal (*fiscal stress*) dan darurat fiskal lokal (*fiscal emergency*) tidak muncul tanpa sebab. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk merancang sistem peringatan dini yang memantau kesehatan fiskal pemerintah daerah dan memprediksi krisis fiskal yang potensial.

Melalui pengalaman, pemerintah pusat atau provinsi di banyak negara mengakui bahwa krisis fiskal lokal sering disebabkan oleh peningkatan pesat dalam pengeluaran relatif terhadap pendapatan, defisit terus-menerus, utang pemerintah yang tinggi, dan masalah likuiditas (kewajiban jangka pendek melebihi aset likuid). Dengan demikian, semakin tanggap pemerintah lokal dalam mendeteksi ambang kesulitan keuangan dan mengambil langkah-langkah (seperti memberikan saran perencanaan keuangan, pengetatan kontrol pengeluaran, meningkatkan pengumpulan pendapatan, dan membatasi pinjaman masa depan) maka hal ini dapat mencegah pemerintah daerah dari tergelincir ke dalam kesukahan yang lebih dalam. Lebih lanjut Jun Ma (2001) menyatakan bahwa untuk menciptakan kondisi fiskal yang sehat daerah harus melakukan tindakan yang terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak dari risiko yang berasal dari aktifitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, mitigasi risiko fiskal sangat diperlukan guna mendesain kebijakan keuangan daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah daerah yang efektif (*effective local governance*).

PEMBAHASAN

Kompleksitas permasalahan keuangan di daerah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan situasi masalah yang mendasari penulis untuk menganalisis lebih mendalam mengenai risiko fiskal daerah. Permasalahan keuangan yang kompleks tentunya juga harus dilihat dari sudut pandang yang kompleks, holistik dan sistemik. Berfikir sistem atau *system thinking* merupakan cara berfikir atau paradigma berfikir secara holistik atau memandang masalah secara menyeluruh dan adanya keterkaitan antara unsur-unsur sistem atau komponen sistem (Checkland 1999, dan Soesilo dan Karuniasa, 2014). Instrumen analisis yang digunakan dalam mendesain kompleksitas keuangan daerah adalah dengan menggunakan *Soft System Methodology* (SSM). Dasar pemikiran SSM adalah berupaya mengkaji fenomena dalam dunia nyata (*real world*) yang berupa situasi permasalahan (*problem situation*), kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan model sebagai upaya pemecahan masalah melalui proses pembejajaran dan pengkajian yang sistemik. Situasi permasalahan khususnya dalam bidang keuangan tampak pada Gambar 1.

Rata-rata pemerintah daerah berada pada kondisi keuangan dimana Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) rendah, derajat desentralisasi fiskal yang rendah, kontribusi PAD terhadap total penerimaan yang sangat rendah, tingginya belanja pegawai, serta defisit anggaran, munculnya dana *idle* dan lain-lain. Kompleksitas permasalahan ini akan berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam konteks pendekatan *Soft System* kompleksitas situasi masalah di dunia nyata diorganisasikan sebagai suatu sistem artinya sifat-sifat dari bagian tidak mempunyai arti jika tidak dalam konteks keseluruhan (Checkland & Scholes, 1990).



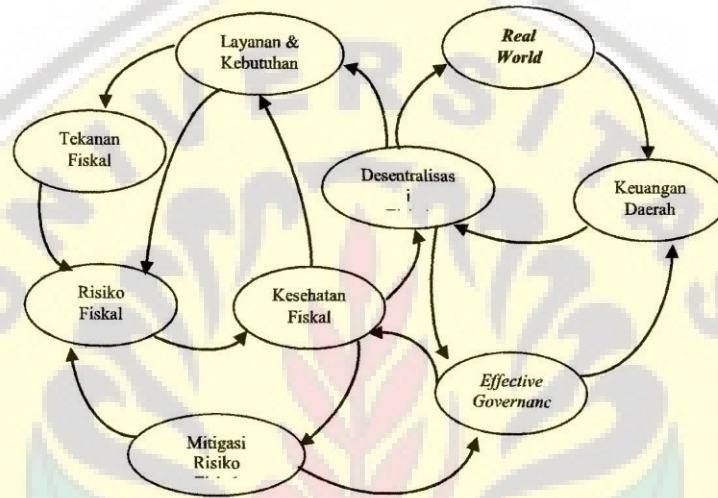
Gambar 1. Real World Keuangan Daerah di Indonesia
Sumber: Data diolah (2017)

Akan lebih baik untuk menggunakan istilah "*holon*" dalam membedakan konsep teoritis dari sistem dunia yang dipersepsikan daripada menggunakan istilah 'sistem' yang biasa digunakan. Suatu *holon* adalah sejenis model yang spesial yang mengorganisasikan pemikiran dengan cara ide-ide sistem (Lane & Olivia, 1998) sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko). Sistem aktivitas manusia merupakan jenis spesifik dari *holon* yang dibentuk dari sekumpulan aktifitas yang saling berhubungan dengan adanya saling ketergantungan untuk membuat keseluruhannya bertujuan (Attefalk & Langervik, 2001) sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko). Sistem aktifitas Hal yang penting untuk dimengerti bahwa ide mengenai sistem disini bukan merupakan cara untuk mendeskripsikan apa yang ada, akan tetapi merupakan cara untuk mendeskripsikan interpretasi mengenai apa yang ada atau suatu pemikiran mengenai apa yang relevan dengan apa yang ada (Wilson, 1984 sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko).

Dalam pemikiran *soft system*, permasalahan tidak terjadi dengan cara sedemikian mungkin sehingga memungkinkan untuk mengisolasi. Oleh karenanya, lebih tepat untuk mendekati persoalan bukan sebagai 'masalah' akan tetapi sebagai 'situasi permasalahan' (Attefalk & Langervik, 2001 sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko). Hal tersebut merupakan bagian dari dunia yang kita persepsikan, yaitu situasi permasalahan yang akan dipelajari dan dieksplorasi (Wilson, 1984 sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko). Berdasarkan pendahuluan yang diuraikan sebelumnya, situasi permasalahan yang akan dipelajari dan dieksplorasi dalam konteks teoritis sebagaimana Gambar 2.

Situasi masalah (*real world*) yang ada di Kabupaten/kota, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan kajian dari keuangan daerah. Jika berbicara tentang keuangan daerah di Indonesia maka tidak akan terlepas dari sistem desentralisasi fiskal yang berlaku. Dengan diterapkannya sistem desentralisasi fiskal menyebabkan bertambahnya jumlah layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Meningkatnya jumlah layanan bagi pemerintah daerah ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan daerah untuk membiayai penyediaan layanan atau dengan kata lain ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pusat. Peningkatan kebutuhan atau belanja daerah tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Satu sisi daerah mengalami peningkatan pengeluaran, namun disisi lain pendapatannya masih belum bisa diandalkan hal inilah yang menimbulkan tekanan fiskal/*fiscal stress* (Siswanto, 2013).



Gambar 2. Situasi Permasalahan yang Akan Dipelajari dan Dieksplorasi dalam konteks Teoritis Pengelolaan Keuangan daerah
Sumber: Data diolah (2017)

Siswanto (2013) menyatakan bahwa masalah keuangan yang ada di daerah serta peningkatan layanan merupakan sumber tekanan fiskal yang akan memicu terjadinya risiko fiskal bagi daerah tersebut. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menerima guncangan risiko dapat dilihat dari kesehatan APBD-nya, semakin sehat APBD maka semakin mampu daerah tersebut menghadapi risiko (Ramadyanto, 2013). Kesehatan fiskal itu sendiri menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan pemberian layanan kepada masyarakat (Huang Ju, 2013).

KESIMPULAN

Kompleksitas permasalahan pengelolaan keuangan daerah harus dilihat secara sistemik. Benang merah dari tulisan diatas yakni kajian kesehatan fiskal daerah menjadi penting guna mengidentifikasi sumber-sumber risiko keuangan bagi pemerintah daerah. Ketika sumber risiko kondisi kesehatan fiskal sudah teridentifikasi maka diperlukan sebuah mitigasi risiko fiskal untuk memberikan rekomendasi kebijakan keuangan daerah demi menciptakan tata kelola pemerintah daerah yang efektif (*effective Local Governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. 2011. *Analisis Hubungan Dana Perimbangan Dengan Kinerja Pelayanan Dasar Publik Di Indonesia*.
- Checkland Peter, Jim Scholes. 1990. *Soft System Methodology in Action*. Chicester: John Wiley & Sons Ltd
- Checkland Peter. 1999. *Sytem Thinking, System Practice. Includes a 30 Year Retrospective*. Chicester: John Wiley & Sons Ltd.
- Elhiraika, Adam B. 2007. *Fiscal Decentralization and Public Service Delivery in South Africa*. ATCP. Economic Commision for Africa.
- Fjeldstac, Odd-Helge and Kari Heggstad. 2012. *Local Government Revenue Mobilisation in Anglophone Africa*. CMI Working Paper yang diakses dari www.cmi.no.
- Honadle Walter Beth, et al. 2004. *Fiscal Health For Local Government*. Elsevier Academic Press.
- Hoesada, Jan. 2015. *Risiko Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah. Komite Standard Akuntansi pemerintahan*. Diakses dari www.ksap.org pada 7 Desember 2015
- Huang Ju, Chiung and Yuan-Hong Ho. 2013. Analyzing the Fiscal health of Governments in Taiwan: Evidence from Quantile Analysis. *Woril Academy of Science, Engineering and Technology Vol:79 2013-07-23 International Science Index 79*, 2013. Weset.org/publications/16458.
- Institute for Development of Economic and Finance (INDEF). 2016. *Kajian Tengah Tahun INDEF 2016: Evaluasi Paket, Evaluasi Ekonomi*. Jakarta: INDEF.
- Jun Ma. 2001. *Monitoring Fiscal Risk of Sub national Governments*.; Selected Country Experience. World Bank diakses dari www.info.worldbank.org pada 13 April 2015.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal. Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementerian Keuangan RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*. Jakarta.
- Koeswara, Hendri, Roza Liesmana et.al. 2013. Proposing an Efficient and Democratic Policy of General Election Budget for Promoting Local Fiscal Autonomy. *International Journal of Administrative Science & Organization*, May 2013 Vol 20, Number 2.
- Polackova, Brix Hana. 2005. *Addressing Contingent Liabilities and Fiscal Risk*. In *Fiscal Management* Ed. Anwar Shah Washington DC: World Bank.
- Ramadyanto, Widodo. 2013. *Risiko Fiskal Daerah: Apa dan Bagaimana?*. Dalam *Risiko Fiskal Daerah Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kestinambungan Pembangunan*. Ed. Drs. Freddy R Saragih, M. P.Acc. Solo: Adicitra Intermedia.
- Siswanto, Adrianus, Dwi. 2013. *Identifikasi sumber-sumber Risiko Fiskal Daerah*. Dalam *Risiko Fiskal Daerah Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kestinambungan Pembangunan*. Ed. Drs. Freddy R Saragih, M. P.Acc. Solo: Adicitra Intermedia.
- Widjayani dan Gatot Yudoko. *Penggunaan Soft System metodologi dan Grounded Theory dalam Membangun teori Pada Penelitian Proses Strategi (strategi Proses)*. Universitas langlang Buana dan ITB Bandung.
- Yenida dan Zaitul Ikhlas Saad. 2008. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Oktober 2008, Volume 3 No.2.